

### **DAFTAR ISI**

DAF	TAR	ISI	1	
PENDAHULUAN				
1	.1	Latar Belakang	4	
1	.2	Landacan Hukum	5	
1	.3			
1	.4	Keluaran	5	
E-BI	ETING	6		
2	.1	Delilisi E-duugetilig	O	
2	.2	Flowchart	7	
2	.3	Operator	7	
2	.4	Kebutuhan Perangkat	8	
2	.5	E-Budgeting Yang Pernah Dikerjakan	8	
2	.6	Harga E-Budgeting	9	
TAN	AN DAN FITUR	10		
3	.1	Tampilan Umum Aplikasi	10	
	3.1.	1 Halaman Login	10	
	3.1.	2 Tampilan Utama	10	
3	.2	Fitur Aplikasi	11	
	3.2.	1 Fitur Profil Pengguna	11	
	3.2.	2 Fitur Klasifikasi Urusan	11	
	3.2.	3 Fitur Manajemen Pengguna	12	
	3.2.	4 Fitur Info SKPD	12	

	3.2.5	Fitur Daftar SKPD 1	<b>L</b> 2
	3.2.6	Fitur Satuan 1	<b>L</b> 2
	3.2.7	Fitur Wilayah1	L3
	3.2.8	Fitur Jadwal1	L3
	3.2.9	Fitur RPJMD1	<b>L</b> 4
	3.2.10	Fitur Renstra1	L5
	3.2.11	Fitur Musrenbang (Kecamatan)1	L <b>5</b> <sub>1</sub>
	3.2.12	Fitur Usulan RENJA1	.5
	3.2.13	Fitur Usulan RKPD1	6
	3.2.14	Fitur RKPD1	7
	3.2.15	Fitur RENJA1	١7
	3.2.16	Fitur KUA-PPAS	L8
	3.2.17	Fitur Cetak1	8
PEN	IUTUP	1	١9



# 1.1 LATAR BELAKANG

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan tersebut benar-benar memiliki manfaat dan dampak jangka panjang bagi masyarakat luas, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan itu sendiri memerlukan suatu upaya keberlanjutan dan kesinambungan.

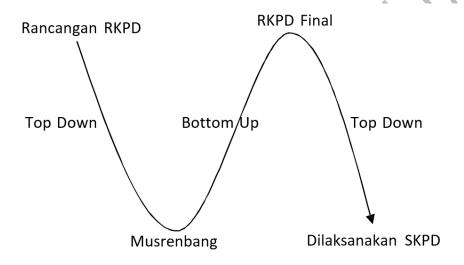
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, dan menetapkan bahwa Perencanaan Pembangunan memiliki tujuan:

- ✓ Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- ✓ Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
- Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- ✓ Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Aplikasi E-Budgeting dirancang untuk memudahkan penyelenggaraan siklus perencanaan pembangunan kota/kabupaten, terutama bagi SKPD dalam penyusunan program/kegiatan. Keberadaan aplikasi ini memegang peranan yang cukup penting dalam

proses perencanaan pembangunan khususnya saat pengusulan program/kegiatan/anggaran SKPD. Pengoperasian aplikasi E-Budgeting dirancang melalui website agar seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, sampai di tingkat Kecamatan dapat menggunakannya secara *online*.

Proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah sejak awal yaitu penyusunan rancangan awal RKPD, kemudian pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir hingga penetapan RKPD berlangsung secara variatif antara top-down dan bottom-up dengan mengikuti pola 'S shape' berikut:



# 1.2 LANDASAN HUKUM

- Aplikasi E-Budgeting ini dikembangkan sesuai dengan aturan dan Perundang-Undangan yang berlaku. Antara lain:
  - Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara
    Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
  - Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
  - Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
  - Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003, tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2014, tentang Pedoman Penyusunan,
    Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan
  Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
  Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

### 1.3 MAKSUD & TUJUAN

Maksud dari pembuatan E-Budgeting adalah membantu proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang mengintegrasikan proses musrenbang, penyusunan RENJA, RKPD hingga KUA-PPAS di lingkungan pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun tujuan dari pembuatan E-Budgeting yaitu:

- 1. Menyediakan alat bantu untuk mekaniame pengusulan kegiatan seperti musrenbang kecamatan.
- 2. Menyediakan alat bantu penyusunan rencana program kegiatan di masing-masing SKPD.
- 3. Menyediakan alat bantu penyusunan Ran-RKPD, RKPD dan KUA-PPAS Kabupaten/Kota oleh Bappeda.
- 4. Menciptakan sistem perencanaan yang efektif dan efisien.

### 1.4 KELUARAN

Keluaran yang kami tawarkan dari kegiatan ini adalah:

- 1. Aplikasi E-Budgeting.
- Buku Panduan Aplikasi.
- 3. Pelatihan Penggunaan Aplikasi.



# 2.1 DEFINISI & PEMANFAATAN

Aplikasi E-Budgeting adalah sebuah aplikasi yang dibangun sebagai media atau alat untuk mengumpulkan data perencanaan pembangunan daerah. Aplikasi ini di design sedemikian rupa untuk dapat mendukung pemerintah data daerah dalam penyusunan rencana kegiatan secara terintegraasi, mulai dari proses Musrenbang kecamatan hingga penyusunan APBD.

Dengan adanya aplikasi ini, Bappeda dapat mengkoordinasikan dan mengumpulkan data perencanaan secara sistematis yang meliputi dokumen RPJMD, Renstra, dokumen Musrenbang, RENJA setiap SKPD, RKPD dan KUA-PPAS.

Dengan basis data yang telah rapi dan tersusun secara sistematis tersebut diharapkan akan membantu pemerintah daerah dalam menentukan fokus prioritas pembangunan karena pemerintah telah memiliki perencanaan yang baik dan efektif.

Ada beberapa hal yang akan terbantu dengan adanya aplikasi E-Budgeting ini:

- Mencegah terjadinya tumpang tindih kegiatan antar SKPD.
- Menganalisa penyebaran alokasi dana terhadap sektor-sektor pembangunan maupun alokasi terhadap wilayah kecamatan.
- Efektifitas dan efisiensi biaya dan waktu dalam hal koordinasi pengumpulan data.

## 2.2 FLOWCHART

Secara sederhana, proses yang berjalan dalam Aplikasi E-Budgeting ini dapat dilihat pada flowchart dibawah.



# 2.3 OPERATOR

Di dalam aplikasi E-Budgeting, terdapat tiga jenis operator, yaitu:

- a. Super Operator (Bappeda), adalah operator yang bertugas untuk menginput (tambah/ubah/hapus) data-data dasar pada aplikasi, diantaranya, kode kegiatan/program, tahun anggaran, pengguna, dan satuan.
- b. Tim Anggaran (Bappeda), adalah kelompok/tim dari Bappeda yang bertugas untuk melakukan pengawasan pada pengisian yang dilakukan oleh SKPD, melalui sistem penjadwalan. Selain itu Tim Anggaran dapat menyusun RPJMD, Rancangan RPKD, RKPD dan KUA-PPAS
- c. Operator SKPD, adalah operator dari setiap SKPD yang bertugas untuk menyusun Renstra, mengusulkan program/kegiatan (Musrenbang), dan menyusun RENJA.

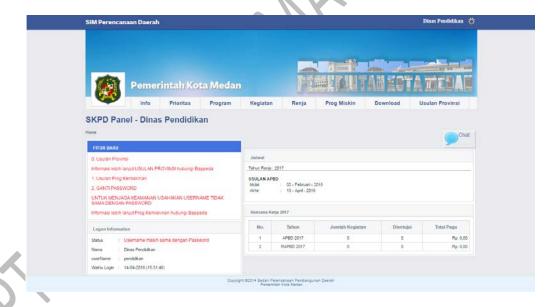
# 2.4 **KEBUTUHAN** PERANGKAT

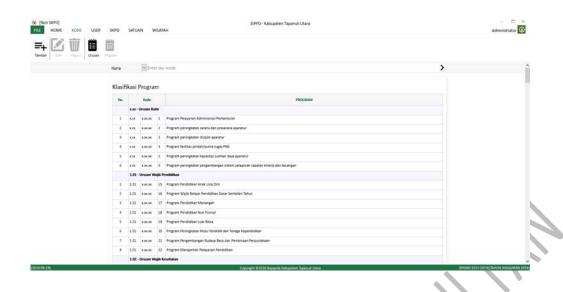
Adapun perangkat yang dibutuhkan dalam penggunaan Aplikasi E-Budgeting:

- 1. Server (*Host*). Server memiliki fitur *web server*, dan *database server*. Ada dua pilihan, antara lain: (1) menyewa hosting di server provider; (2) menyediakan server sendiri.
- Komputer Pengguna yang dilengkapi aplikasi web browser (Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, Safari)
- 3. Jaringan (interconnection) Komputer (Internet/WAN/LAN)

### 2.5 E-BUDGETING YANG PERNAH DIKERJAKAN

- 1. E-Budgeting Kota Medan (<a href="http://www.pemkomedan.ga">http://www.pemkomedan.ga</a>)
- 2. E-Budgeting Kabupaten Tapanuli Utara (http://sippd.taputkab.go.id)
- 3. E-Budgeting Kabupaten Labuhan Batu Selatan







### 2.6 HARGA E-BUDGETING

3

Untuk Harga Software E-Budgeting dapat menghubungi kontak Person kami ke M. Kurniawan Ginting (0813 9775 0248)



# 3.1 TAMPILAN UMUM

#### 3.1.1 Halaman Login

-

Dalam halaman login, terdapat field untuk mengisikan username dan password untuk menggunakan aplikasi E-Budgeting.

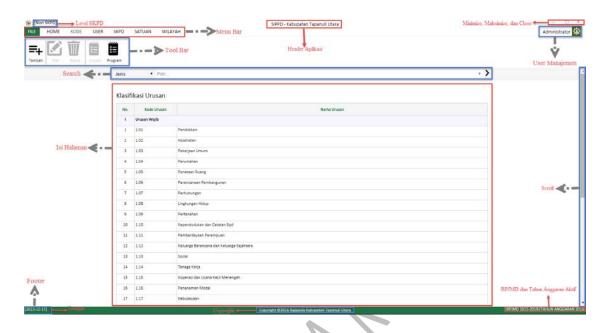


#### 3.1.2 Halaman Utama

-

-

Tampilan ini merupakan tampilan umum dari Aplikasi E-Budgeting Pada Masing-Masing halaman yang tersedia.



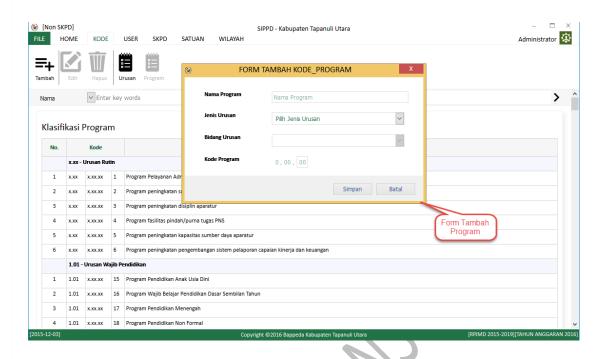
# 3.2 FITUR APLIKASI

#### 3.2.1 Fitur Profil Pengguna

Fitur ini berfungsi untuk mengubah informasi pengguna aplikasi E-Budgeting. Berupa nama, NIP, password.

#### 3.2.2 Fitur Klasifikasi Urusan

Fitur ini berfungsi untuk menambahkan, mengubah dan menghapus klasifikasi urusan dan program beserta kodenya.



#### 3.2.3 Fitur Manajemen Pengguna

Fitur ini memiliki fitur untuk menambahkan, mengubah dan menghapus data pengguna aplikasi E-Budgeting.

#### 3.2.4 Fitur Info SKPD

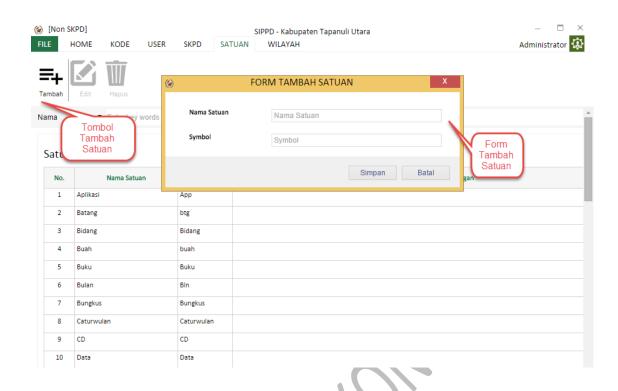
Fitur ini berfungsi untuk mengubah informasi umum mengenai SKPD yang dikelola oleh operator. Data yang disesuaikan yaitu berupa nama/NIP Kepala SKPD, Alamat, visi/misi, dan Tupoksi

### 3.2.5 Fitur Daftar SKPD

Fitur ini berfungsi untuk menambah, mengubah dan menghapus data SKPD, urusan serta kode SKPD yang menggunakan aplikasi E-Budgeting.

#### 3.2.6 Fitur Satuan

Fitur ini berfungsi untuk menambah, mengubah dan menghapus satuan kegiatan yang akan digunakan pada saat memasukkan data program/kegiatan pada aplikasi E-Budgeting.



### 3.2.7 Fitur Wilayah

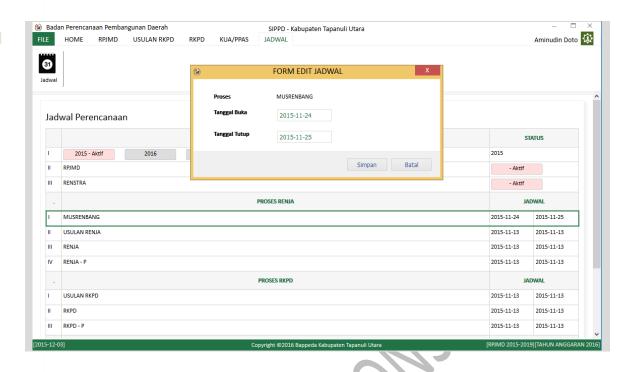
 $-\times$ 

-

Fitur ini berfungsi untuk menambah, mengubah dan menghapus wilayah yang berupa desa, kelurahan dan kecamatan yang akan digunakan pada saat pengisian data pada Aplikasi E-Budgeting.

#### 3.2.8 Fitur Jadwal

Fitur ini digunakan oleh Bappeda sebagai koordinator untuk dapat mengendalikan jadwal pengisian data sesuai dengan siklus perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Jadwal yang dapat diatur tersebut meliputi: jadwal musrenbang, penyusunan usulan RENJA, penyusunan usulan RKPD, penyusunan RENJA, penyusunan RKPD, penyusunan RKPD-P.



#### 3.2.9 Fitur RPJMD

\

 $\times$ 

\

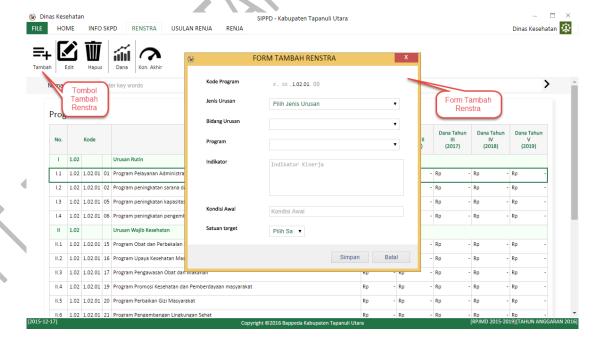
· / 

1

-

1 

Fitur ini berisi data dan informasi dokumen RPJMD Kabupaten / Kota yang menjadi dasar pengisian aplikasi E-Budgeting. Antara lain: Nama KDH/Wakil, Visi/Misi KDH, prioritas pembangunan.

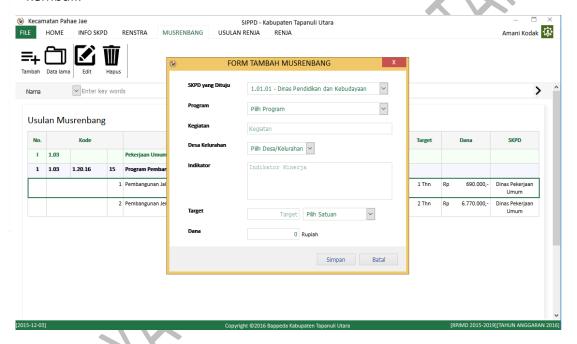


#### 3.2.10 Fitur Renstra

Fitur ini berfungsi untuk menampilkan/menyusun rencana strategis SKPD selama 5 tahun dan kondisi akhirnya setelah 5 tahun pelaksananaan kegiatan.

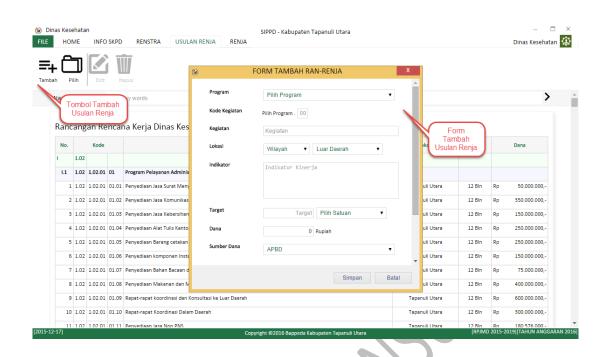
#### 3.2.11 Fitur Musrenbang (Kecamatan)

Fitur ini berfungsi bagi kecamatan untuk memberikan usulan pembangunan melalui mekanisme Musrenbang. Dalam aplikasi ini juga dimungkinkan untuk mengambil data usulan pada tahun-tahun sebelumnya untuk dapat diusulkan kembali.



#### 3.2.12 Fitur Usulan RENJA

Fitur ini berfungsi untuk menyusun rencana kegiatan setiap SKPD yang sifatnya masih dalam bentuk usulan. Pihak SKPD teknis juga dapat memilih dari data-data Musrenbang yang telah diusulkan kecamatan.



#### 3.2.13 Fitur Usulan RKPD

 $\times$ 

/

-

Fitur ini berfungsi untuk menyetujui, mengubah, dan menghapus usulan rencana kerja yang telah diajukan oleh SKPD dan mengintegrasikannya menjadi sebuah rancangan RKPD Kabupaten/Kota.

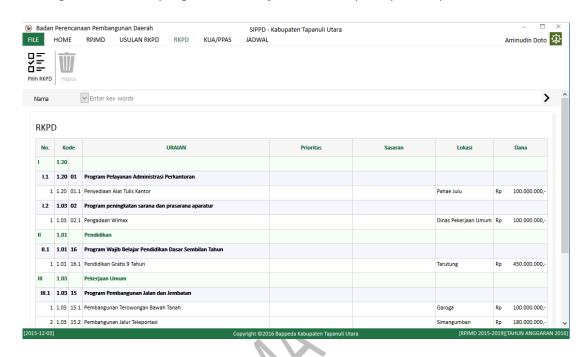


#### 3.2.14 Fitur RKPD

-

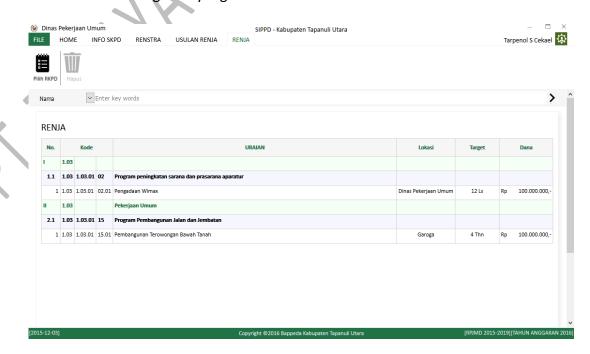
-

Fitur ini berfungsi untuk memodifikasi Ran-RKPD menjadi RKPD final sesuai dengan hasil RKPD yang telah disetujui dan ditetapkan pada rapat DPRD.



#### 3.2.15 Fitur RENJA

Fitur ini berfungsi untuk menyusun rencana kerja SKPD sesuai dengan dokumen RKPD yang telah ditetapkan. Dalam aplikasi ini hanya akan disediakan fasilitas untuk memilih kegiatan yang telah terdaftar dalam database RKPD.



#### 3.2.16 Fitur KUA-PPAS

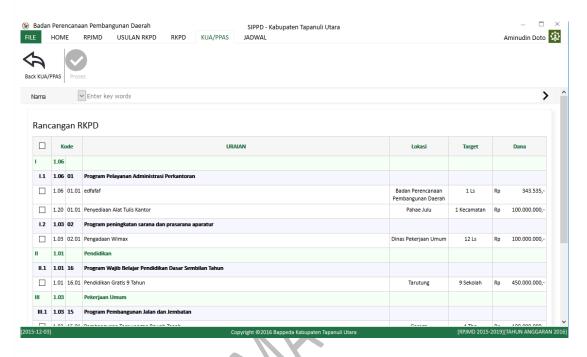
\

1

-

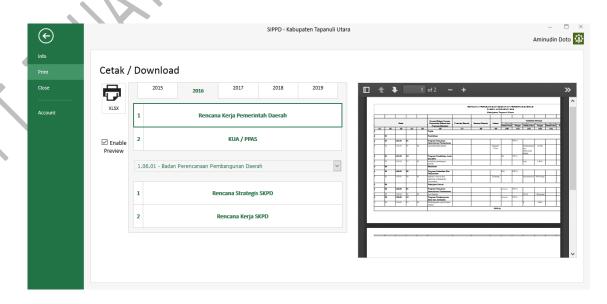
-

Fitur ini akan digunankan Bappeda untuk menyusun dokumen KUA-PPAS.



#### 3.2.17 Fitur Cetak

Fitur ini digunakan untuk menampilkan halaman unduh, sehingga Pengguna dapat mengunduh keluaran dari E-Budgeting dalam bentuk excel sesuai dengan SKPD. Adapun keluaran dari E-Budgeting yang dapat diunduh yaitu: RKPD, KUA/PPAS, Renstra SKPD dan RENJA.





Suatu kehormatan apabila dengan pemanfaatan aplikasi E-Budgeting ini pengguna dapat lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami

PT. TRIJAYA UTAMA KONSULTAN